JURNAL ILMU EKONOMI (JIE)
Vol. 4 No. 1, April 2025
https://risetekonomi.com/jurnal/index.php/jie
E-ISSN : 2985-4652

PENGARUH PDRB, JUMLAH PENDUDUK, BELANJA MODAL, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

Kharisma Dina Febriana[1], Siti Sriningsih[2], Ahmad Zaenal wafik[3]

[1,2,3] Universitas Mataram, Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of GRDP, population, capital expenditure, and equalization funds in West Lombok Regency. The type of data used in this study is and secondary where the data used is time series data from 2014-2023 and analyzed using multiple linear regression through Eviews 10. The results showed that the balance fund had no effect, while GRDP, population, and capital expenditure had a significant effect on local revenue. This research underscores the importance of improving the efficiency of capital expenditure management and strengthening regional fiscal policy to improve PAD performance in a sustainable manner.

***Keywords**: GRDP, population, capital expenditure, equalization funds, local revenue*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh PDRB, jumlah penduduk, belanja modal, dan dana perimbangan di Kabupaten Lombok Barat. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dan sekunder yang dimana data yang digunakan yaitu data time series dari tahun 2014-2023 dan dianalisis melalui regresi linear berganda pada *Eviews* 10. Penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh, sedangkan PDRB, jumlah penduduk, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggaris bawahi pentingnya meningkatkan efisiensi pengelolaan belanja modal dan memperkuat kebijakan fiskal daerah untuk meningkatkan kinerja PAD secara berkelanjutan.

Kata Kunci: PDRB, jumlah penduduk, belanja modal, dana perimbangan, Pendapatan asli daerah

RIWAYAT ARTIKEL
Tanggal Masuk: 28-02-2025
Tanggal Diterima: 06-03-2025
Tersedia *Online*: 04-04-2025

KORESPONDENSI:
Nama : Kharisma Dina Febriana
E-mail:
Kharismadinafebriana123@gmail.com

DOI:
https://doi.org/10.59827/jie.v4i1.205
PENERBIT:
Laboratorium Riset Ekonomi

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi undang -undang Nomor 1 Tahun 2022 Pelaksanaan otonomi daerah yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun yang menjelaskan tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Pada hal ini mencakup sumber penerimaan daerah, retribusi dan pajak, transfer ke daerah/TKD, belanja daerah, kewenangan melaksanakan pembiayaan daerah, dan sinergi kebijakan fiskal. (Katjong et al., 2024)

Diharapkan dengan adanya otonomi daerah akan meningkatkan tingkat kerukunan masyarakat, karena jika pelayanan yang diberikan minim dan memuaskan, maka Tingkat kerukunan Masyarakat akan menurun melalui pendapatan asli daerah (PAD).

Gambar 1.

Pendapatan Asli Daerah kab. Lombok Barat Tahun 2014-2023

NO	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2014	2.923.616.362.119	2.789.427.241.814	95
2	2015	3.555.737.341.478	3.448.585.631.903	97
3	2016	3.802.933.445.799	3.949.996.798.342	104
4	2017	5.121.402.497.258	5.083.156.004.899	99
5	2018	5.346.185.181.053	4.941.129.737.195	92
6	2019	5.244.782.852.000	2.525.861.069.399	48
7	2020	1.979.279.325.434	1.815.690.092.106	92
8	2021	2.258.283.418.223	1.888.606.213.096	84
9	2022	2.738.892.515.300	2.287.653.655.567	84
10	2023	3.069.211.488.392	2.790.069.455.407	91

Sumber: (BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Berdasarkan data yang terlampir diatas dapat diketahaui bahawa data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB dari tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada 2014, PAD tercatat sebesar Rp2,78 triliun dan terus meningkat hingga mencapai puncak tertinggi Rp5,08 triliun pada 2017. Namun, pada 2018, PAD menurun menjadi Rp4,94 triliun, diikuti penurunan signifikan pada 2019 dengan nilai Rp2,52 triliun. Penurunan ini berlanjut hingga 2020 dengan PAD sebesar Rp1,81 triliun, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Meski demikian, terjadi peningkatan bertahap pada 2021 dan 2022, dengan PAD masing-masing sebesar Rp1,88 triliun dan

Rp2,28 triliun. Pada 2023, PAD kembali meningkat menjadi Rp2,79 triliun, mendekati nilai PAD pada 2014. Fluktuasi ini menunjukkan pengaruh faktor eksternal, terutama pandemi, terhadap penerimaan PAD NTB dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan judul yang tertera pada penulisan ini yang dimana pada Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat beberapa kabupaten salah satunya pada Kabupaten Lombok Barat, dipilihnya Kabupaten Lombok Barat berdasarkan dengan data yang dikumpulkan bahwa pada data PAD Kabupaten Lombok Barat mengalami fluktuasi pada tahun 2014-2023. Dengan adanya hal tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh variabel PDRB, jumlah penduduk, belanja modal, dan dana perimbangan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah.

TABEL 2 PAD LOMBOK BARAT TAHUN 2014-2023

No.	Tahun	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1	2014	166.175.113.318,83	169.108.924.482,66	101,76
2	2015	191.625.792.712,59	171.165.286.744,24	89,32
3	2016	209.161.736.029,81	200.570.625.806,19	95,89
4	2017	238.730.142.814,60	290.993.583.144,35	106,01
5	2018	254.444.383.760,37	217.074.804.213,30	85,31
6	2019	281.812.802.076,19	247.115.353.485,16	87,67
7	2020	251.904.996.796,71	219.038.703.946,65	86,95
8	2021	314.918.940.275,00	294.901.152.911,00	93,64
9	2022	356.051.018.264,00	268.803.499.789,00	75,50
10	2023	395.446.782.572,00	341.535.799.392,00	86,37

(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Berdasarkan pada tabel yang terlampir ditatas penulis mendapatkan informasi mengenai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Barat yang dimana data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Barat dari tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi antara anggaran dan realisasi dengan tren pertumbuhan dalam jumlah anggaran setiap tahun, namun dengan variasi dalam persentase realisasi. Pada tahun 2014, realisasi PAD melebihi anggaran yang ditetapkan. Selain itu, terdapat beberapa tahun seperti tahun 2017 yang realisasinya mencapai 106,01%, menandakan kinerja yang baik. Namun pada tahun-tahun lainnya seperti tahun 2015, 2018, dan 2019, realisasinya belum mencapai 90%, menunjukkan adanya hambatan dalam mencapai target PAD. Realisasi terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 75,50% pada tahun ini

merupakan tahun dengan realisasi terendah selama tahun 2014-2023 hal ini terjadi karena kurangnya efisiensi produktifitas dari pihak disperindag yang seharusnya mengelola 33 pasar namun yang berhasil dikelola hanya 23 pasar hal ini salah satu penyebab turunnya realisasi anggaran pada tahun 2022 di Kabupaten Lombok Barat, sedangkan tahun 2023 menunjukkan peningkatan hingga 86,37%, meskipun tetap di bawah target anggaran. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya variasi yang signifikan antara anggaran dan realisasi, yang disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis pengaruh PDRB, jumlah penduduk, belanja modal, dan dana perimbangan secara parsial dan simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Barat.

TELAAH LITERATUR

A. Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 mengatur mengenai interaksi finansial antara pemerintah pusat dan daerah. Pendapatan Asli Daerah dalam konteks ini mencakup semua penerimaan daerah yang berasal dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta berbagai jenis pendapatan legal lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.(Katjong et al., 2024).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Pendapatan Asli Daerah merupakan jumlah uang yang diterima oleh pemerintah daerah melalui berbagai upaya untuk mengumpulkan dana guna mendukung kebutuhan operasional daerah. Upaya tersebut mencakup pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan dari usaha milik daerah, serta berbagai jenis pendapatan sah lainnya. (BPS, 2015).

B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang meliputi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pembagian urusan pemerintahan yang terbagi menjadi urusan *absolut, konkuren,* dan pemerintahan umum. dalam undang-undang ini memberikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pembangunan

ekonomi daerah, termasuk PDRB. Dalam undang-undang ini, PDRB menjadi salah satu indikator dalam melancarkan kinerja perekonomian daerah (BPK, 2014).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berperan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, membantu mengidentifikasi sektor-sektor yang berkontribusi terhadap perubahan ekonomi. Dalam penghitungan PDRB, terdapat dua pendekatan berdasarkan jenis harga yang digunakan, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). ADHB mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga aktual pada periode tertentu. Sementara itu, ADHK mengukur nilai tambah dengan menggunakan harga tetap dari tahun acuan tertentu, sehingga dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun tanpa terpengaruh inflasi. Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihitung setiap tahun mempertimbangkan faktor inflasi, memungkinkan analisis terhadap perubahan struktur dan pergeseran ekonomi di suatu wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total pendapatan yang dihasilkan di dalam negeri, termasuk pendapatan dari faktor produksi luar negeri, total pengeluaran untuk barang dan jasa yang diproduksi domestik, serta total pendapatan atau nilai pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam perekonomian selama periode tertentu(Asmuruf *et al.,* 2015).

Menurut Sriningsih *et al.,* (2023) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, yang juga berfungsi sebagai indikator pertumbuhan ekonomi regional.

C. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah sejumlah orang yang sah yang mendiami suatu daerah atau negara serta mentaati ketentuan-ketentuan dari daerah atau negara tersebut. Jumlah penduduk dapat mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah, Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang ditarik juga akan meningkat (Asmuruf et al., 2015).

Orang yang menetap dan tinggal di suatu tempat disebut penduduk. Baik di negara maju maupun yang sedang berkembang, Pendapatan Asli Daerah cenderung meningkat. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, muncul pula lebih banyak individu kreatif dan berbakat, serta kemajuan teknologi yang terus berkembang. Selain itu, Simon mengungkapkan bahwa pertumbuhan populasi turut mendorong kemajuan ekonomi.

Jumlah penduduk yang semakin banyak akan menciptakan permintaan yang lebih tinggi terhadap barang konsumsi, yang pada gilirannya akan memacu produksi dalam skala ekonomi, sehingga biaya produksi dapat turun (Adriani, 2018).

D. Belanja Modal

Belanja daerah dipandang sebagai pengurangan total kekayaan bersih selama satu tahun anggaran. Anggaran belanja daerah digunakan untuk menjalankan tugas pemerintahan, yang meliputi biaya operasional dan investasi. Pengalokasiannya disusun berdasarkan standar harga serta analisis belanja yang telah ditetapkan. (Katjong *et al.*, 2024).

Banyak orang memandang gaji sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka. Namun, belanja modal merujuk pada pengeluaran pemerintah daerah yang memiliki manfaat jangka panjang, lebih dari sekadar anggaran tahunan, dan berfungsi untuk meningkatkan aset atau kekayaan daerah. Belanja modal digunakan untuk pengadaan aset tetap seperti infrastruktur, peralatan, dan properti lainnya. Modal untuk pembelian ini diperoleh melalui proses tender atau lelang (Maharani *et al*., 2024).

Belanja modal menurut Sriningsih *et al.*, (2024) berkaitan dengan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan. Peneliitian ini menunjukan bahwa alokasi anggaran belanja modal tidak semua mencapai efisiensi yang optimal di beberapa daerah dengan belanja tinggi justru mengalami inefiseinsi, sementara daerah dengan belanaja lebih kecil cenderung efisien.

E. Dana Perimbangan

Dana perimbangan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, adalah dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk dikelola dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Dana ini mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), yang diberikan berdasarkan persentase tertentu sebagai bagian dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, terdapat pula Dana Alokasi Khusus (DAK), yang digunakan untuk mendanai program, kegiatan, atau kebijakan prioritas nasional dan memperkuat layanan publik di daerah. Secara keseluruhan, dana perimbangan bertujuan untuk membantu daerah

dalam memenuhi kebutuhan pendanaan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi (Ramadhan & Syahidin, 2020).

Dana perimbangan, yang mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah untuk mengurangi ketimpangan fiskal. Dana ini dialokasikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain itu, dana perimbangan juga bertujuan untuk membantu daerah dalam mengatasi ketimpangan fiskal, sehingga dapat digunakan untuk membangun berbagai fasilitas (Manduapessy, 2020).

F. Penelitian Terdahulu

a. Penelitian oleh Batik, (2013) membahas bagaimana investasi, PDRB, Jumlah penduduk, penerimaan Pembangunan, dan inflasi, mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini dilakukan melalui analisis linier berganda dengan menggunakan metode OLS (ordinatry Least Square). Pendapatan Asli Daerah adalah variabel yang sangat dipengaruhi oleh variabel hasil bebas I, PDRB, JP, PP, dan IF.
b. Penelitian yang dilakukan oleh Asmuruf *et al.,* (2015)) mengkaji pengaruh jumlah penduduk, pendapatan perkapita, dan PDRB terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda dengan teknik Ordinary Least Square (OLS), menggunakan data sekunder dari tahun 2007 hingga 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB ADHB dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Sebaliknya, peningkatan jumlah penduduk justru berhubungan dengan penurunan pendapatan asli daerah, sementara PDRB ADHB dan jumlah penduduk tidak memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah secara bersamaan.
c. Penelitian yang dilakukan oleh Goban *et al.*,(2023) menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada periode 2017–2021. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan metode analisis data panel. Dalam analisisnya, peneliti mengaplikasikan tiga model efek yang berbeda, yaitu Ordinary Least Square (OLS), Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebaliknya, variabel Jumlah Penduduk (X2) dan Pendapatan Perkapita (X3) terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD di daerah tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian kuantitatif dengan data time series dari tahun 2014-2023 yang didapatkan dari BPS Nusa Tenggara Barat dan BPS Kabupaten Lombok Barat. Pendekatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dan menggunakan *software Eviews* 10. Penelitian ini berfokus pada empat variabel independent utama yaitu: PDRB, Jumlah Penduduk, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lombok Barat. Model ekonometrik yang digunakan untuk estimasi dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X1_t + \beta_2 X2_t + \beta_3 X3_t + \beta_4 X4_t + e_t$$

Keterangan :

Y_t = Pendapatan Asli Daerah

t = Tahun

β_0 = Konstanta

$X1_t$ = Variabel PDRB

$X2_t$ = Variabel Jumlah Penduduk

$X3_t$ = Variabel Belanja Modal

$X4_t$ = Variabel Dana Perimbangan

e_t = Kesalahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Adapun kondisi PDRB Kab. Lombok Barat Tahun 2014-2023 dapat diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel PDRB Kab. Lombok Barat Tahun 2014-2023 (Juta rupiah)

Tahun	PDRB
2014	8.708.308
2015	9.264.355
2016	9.792.221
2017	10.432.306
2018	10.491.747
2019	10.894.637
2020	10.128.301
2021	10.472.207
2022	10.834.218
2023	11.379.480

Sumber: *(Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat)*

PDRB Lombok Barat menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dari tahun 2014 hingga 2023, meskipun sempat mengalami tantangan signifikan pada tahun 2020. Pada tahun 2014, PDRB tercatat sebesar Rp 8.708.308 juta rupiah, dan terus meningkat secara stabil hingga mencapai Rp 10.894.637 juta rupiah pada tahun 2019, Namun pada tahun 2020 dampak pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pada PDRB menjadi Rp 10.128.301 juta rupiah, turun sekitar 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2021, ketika PDRB meningkat menjadi Rp 10.472.207 juta rupiah , dan tren ini berlanjut hingga tahun 2023, dengan angka tertinggi sebesar Rp 11.379.480 juta rupiah. Pemulihan ini menunjukkan keberhasilan Lombok Barat dalam mengatasi dampak pandemi, didukung oleh kebijakan pemerintah, peningkatan sektor pariwisata setelah pembukaan kembali destinasi wisata, dan perbaikan sektor agribisnis. Sektor pariwisata tetap menjadi pendorong utama perekonomian, sementara sektor pertanian dan perdagangan juga memberikan kontribusi yang signifikan.

Tabel Jumlah Penduduk kab. Lombok Barat tahun 2014-2023 (ribu jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk
2014	279.123
2015	299.430
2016	316.827
2017	327.576
2018	288.761
2019	367.787
2020	342.531
2021	367.379
2022	377.544
2023	394.014

Sumber: *(Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat)*

Data jumlah penduduk Lombok Barat dari tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, dengan pola pertumbuhan yang tidak selalu konsisten. Pada tahun 2014, jumlah penduduk tercatat sebesar 279.123 jiwa, dan terus meningkat hingga mencapai 327.576 jiwa pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2018, jumlah penduduk mengalami penurunan drastis menjadi 288.761 jiwa, yang dipengaruhi oleh migrasi, faktor administrasi, atau pembaruan data kependudukan . Setelah itu, terjadi pergerakan signifikan pada tahun 2019, dengan jumlah penduduk mencapai 367.787 jiwa, dan kembali mengalami fluktuasi pada tahun 2020, turun menjadi 342.531 jiwa.Tren pertumbuhan penduduk kembali stabil setelah tahun 2020, dengan peningkatan jumlah penduduk yang konsisten. Pada tahun 2021, jumlah penduduk mencapai 367.379 jiwa, kemudian meningkat menjadi 377.544 jiwa pada tahun 2022, dan mencapai angka tertinggi sebesar 394.014 jiwa pada tahun 2023. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya tren positif dalam jumlah penduduk Lombok Barat selama beberapa tahun terakhir.

Belanja Modal kab. Lombok Barat Tahun 2014-2023 (miliar rupiah)

Tahun	Belanja Modal
2014	202.897.307.528
2015	274.331.742.737
2016	281.695.135.344
2017	391.441.279.288
2018	316.234.946.086
2019	444.728.409.290
2020	356.379.430.819
2021	204.504.713.136
2022	246.996.526.940
2023	183.964.427.700

Sumber: *(Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat)*

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Daerah untuk membeli dan membangun aset yang dapat digunakan dalam jangka panjang yang melebihi satu tahun anggaran. Aset tetap yang diperoleh dari belanja modal meliputi peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja modal dari tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan tren awal mengalami peningkatan dari Rp202,89 miliar pada tahun 2014 hingga mencapai puncaknya pada Rp444,73 miliar

pada tahun 2019. Periode 2014 hingga 2017 menunjukkan pertumbuhan konsisten, dengan belanja modal meningkat lebih dari 93%, mencerminkan adanya investasi besar dalam infrastruktur atau aset tetap lainnya. Namun, mulai tahun 2018, belanja modal cenderung menurun, terutama setelah tahun 2019. Penurunan tajam terjadi pada 2020 hingga 2021, yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19, di mana anggaran dialihkan untuk penanganan kesehatan dan bantuan sosial. Pada 2022, terjadi peningkatan sebesar 20,8%, yang mencerminkan upaya pemulihan pasca-pandemi, tetapi kembali menurun drastis pada 2023, mencapai titik terendah dalam satu dekade sebesar Rp183,96 miliar hal ini dikarenakan pada tahun 2023 terjadinya efisiensi anggaran pada belanja modal yang meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja asset lainnya. Fluktuasi ini mengindikasikan perubahan prioritas pemerintah, baik dalam merespons situasi darurat maupun mengelola kebutuhan pembangunan. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan belanja modal dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi atau pembangunan infrastruktur.

Dana Perimbangan kab. Lombok Barat Tahun 2014-2023 (miliar rupiah)

Tahun	Dana perimbangan
2014	790.134.683.034
2015	1.127.977.831.337
2016	1.110.810.350.895
2017	1.139.364.531.692
2018	1.108.256.612.429
2019	1.286.853.526.986
2020	1.088.277.768.451
2021	1.271.504.743.296
2022	1.370.518.197.761
2023	1.336.910.844.028

Sumber: *(Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat)*

Dana perimbangan Kabupaten Lombok Barat selama periode 2014 hingga 2023 menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2014, dana perimbangan tercatat sebesar Rp790,13 miliar dan mengalami peningkatan signifikan pada 2015 sebesar 42,7%, mencapai Rp1,13 triliun. Selama periode 2016 hingga 2018, dana perimbangan relatif stabil, meskipun terjadi penurunan, dengan nilai terendah pada

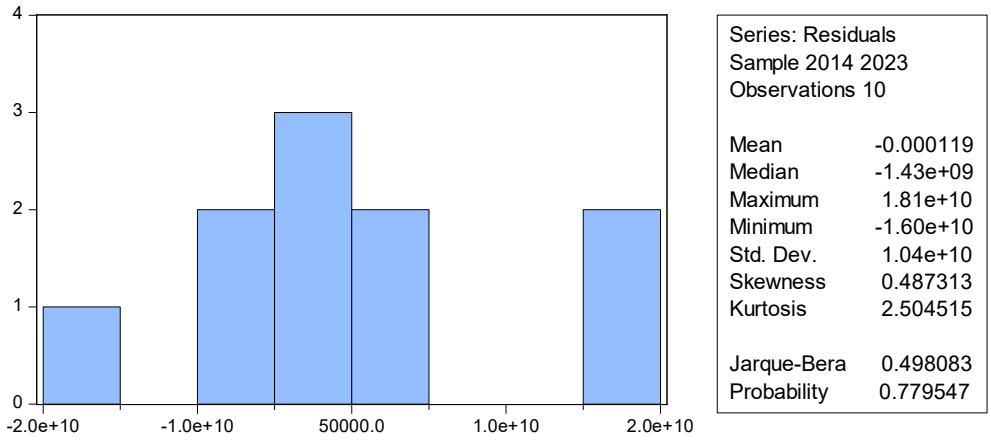
2018 sebesar Rp1,11 triliun. Pada 2019, dana perimbangan kembali meningkat signifikan menjadi Rp1,29 triliun, menunjukkan dukungan fiskal yang lebih besar untuk pemerintah daerah. Namun, pada 2020, dampak pandemi COVID-19 tampak jelas dengan penurunan sebesar 15,4%, menjadi Rp1,08 triliun. Pemulihan mulai terlihat pada 2021 dengan peningkatan dana perimbangan hingga Rp1,27 triliun dan terus meningkat pada 2022, mencapai puncaknya sebesar Rp1,37 triliun. Meski demikian, pada 2023 adanya penurunan menjadi Rp1,34 triliun, meskipun masih berada pada tingkat yang tinggi dibandingkan awal dekade. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional, kebijakan fiskal, dan kebutuhan prioritas daerah. Dengan tren kenaikan pasca-pandemi, dana perimbangan diharapkan dapat terus mendukung pembangunan di Lombok Barat secara berkelanjutan.

B. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Gambar 3.

Hasil Uji Normalitas



Sumber: (Data Olahan Eviews 10, 2024)

Dapat diliat pada gambar diatas bahwa nilai statistik *Probability Jarque-Bera* sebesar 0,779547 > 0,05 maka bisa disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi secara normal lolos uji normalitas.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors
Date: 12/23/24 Time: 19:45
Sample: 2014 2023
Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	5.18E+21	263.8220	NA
PDRB	1.71E+08	915.9148	4.991284
JP	6.30E+10	366.8394	4.608510
BM	0.003397	15.73731	1.168944
DP	0.004348	304.9281	5.588415

Sumber: (Data Olahan Eviews 10, 2024)

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas, nilai *VIF Variabel Independen* <10.00, yang menunjukkan bahwa asumsi uji multikolonieritas dalam penelitian ini telah terpenuhi atau berhasil.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	0.189777	Prob. F(4,5)	0.9338
Obs*R-squared	1.318100	Prob. Chi-Square(4)	0.8583
Scaled explained SS	0.744930	Prob. Chi-Square(4)	0.9457

Sumber: (Data Olahan Eviews 10, 2024)

Dengan nilai probabilitas *Obs*R-Squared* 0,8583 < 0.05, dapat disimpulkan bahwa hasil asumsi uji heteroskedastisitas dari penelitian ini telah terpenuhi atau bahwa data yang digunakan telah memenuhi syarat untuk uji heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.624424	Prob. F(2,2)	0.3810
Obs*R-squared	5.570676	Prob. Chi-Square(2)	0.0617

Sumber: (Data Olahan Eviews 10, 2024)

Berdasarkan tabel di atas, nilai Probability Obs*R-Squared sebesar 0.0617 lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini telah terpenuhi, atau dengan kata lain, data yang digunakan telah lolos uji autokorelasi.

C. Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: PAD
Method: Least Squares
Date: 12/24/24 Time: 13:16
Sample: 2014 2023
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.59E+11	7.20E+10	-4.991057	0.0041
PDRB	54360.77	13065.74	4.160557	0.0088
JP	614666.8	251021.9	2.448658	0.0580
BM	-0.210246	0.058280	-3.607550	0.0154
DP	-0.091140	0.065942	-1.382124	0.2255

R-squared	0.962721	Mean dependent var	2.37E+11
Adjusted R-squared	0.932897	S.D. dependent var	5.41E+10
S.E. of regression	1.40E+10	Akaike info criterion	49.87194
Sum squared resid	9.83E+20	Schwarz criterion	50.02323
Log likelihood	-244.3597	Hannan-Quinn criter.	49.70597
F-statistic	32.28058	Durbin-Watson stat	3.296183
Prob(F-statistic)	0.000914		

$$\mathbf{PAD_t = -359.361.702.466 + (54360,771)PDRB_t + (614666.843)PB_t - (0.21024638)BM_t - (0.091)DP_t}$$

Dari persamaan regresi data di atas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai konstanta yang di peroleh sebesar -359.361.702.466 dengan nilai probabilitas sebesar 0.041 maka bisa disimpulkan bahwa jika variabel *independen* naik, maka variabel *dependen* akan menurun sebesar 359.361.702.466 miliar rupiah.
b. Nilai koefisien regresi variabel PDRB bernilai positif (+) sebesar 54360,771 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0088 maka bisa diartikan bahwa jika varaibel PDRB meningkat sebesar 1 juta maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 54.360.771.000 rupiah begitu juga sebaliknya.
c. Nilai koefisien regresi variabel JP bernilai positif (+) sebesar 614666.843 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0580 maka bisa diartikan bahwa jika varaibel JP meningkat sebesar 1 ribu jiwa maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 614.666.843 rupiah begitu juga sebaliknya.
d. Nilai koefisien regresi variabel BM bernilai negatif (-) sebesar -0.21024638 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0154. belanja modal dapat mempengaruhi PAD secara tidak langsung melalui PDRB. Jika BM tidak meningkatkan PDRB secara signifikan, maka kontribusinya terhadap PAD akan negatif.
e. Nilai koefisien regresi variabel DP bernilai negatif (-) sebesar -0.091 dengan probabilitas 0.2255, maka bisa diartikan bahwa jika varaibel DP meningkat sebesar 1 miliar maka Pendapatan Asli Daerah akan menurun sebesar 91.000.000 rupiah begitu juga sebaliknya. Dan perimbangan dapat bernilai negative terhadap pendapatan asli daerah dikarenakan dana perimbangan yang diterima daerah terlalu besar.

Uji Parsial (Uji T)

a. Hipotesis Pertama (H1)

   Dapat dilihat pada gambar diatas bahwa Variabel PDRB (X1) memiliki nilai *t-Statistic* sebesar 4.160557 dengan nilai *Prob. (Signifikansi)* sebesar 0.0088 (<0.05) bahwa hasil tersebut menyatakan H1 diterima, maka bisa di simpulkan bahwa Variabel PDRB (X1) memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).
b. Hipotesis Kedua (H2)

Dapat dilihat pada gambar diatas bahwa Variabel JP (X2) memiliki nilai *t-Statistic* sebesar 2.448658 dengan nilai *Prob. (Signifikansi)* sebesar 0.0580 sama dengan 0.05 bahwa hasil tersebut menyatakan H2 diterima, maka bisa di tarik kesimpulan bahwa Variabel JP (X2) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

c. Hipotesis Ketiga (H3)

Dapat dilihat pada gambar diatas bahwa Variabel BM (X3) memiliki nilai *t-Statistic* sebesar -3.607550 dengan nilai *Prob.(Signifikansi)* sebesar 0.0154 (<0.05) bahwa hasil tersebut menyatakan H3 diterima, maka bisa di tarik kesimpulan bahwa Variabel BM (X3) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

d. Hipotesis Keempat (H4)

Dapat dilihat pada gambar diatas bahwa Variabel DP (X4) memiliki nilai *t-Statistic* sebesar -1.382124 dengan nilai *Prob. (Signifikansi)* sebesar 0.2255 (>0.05) bahwa hasil tersebut menyatakan H4 ditolak, maka bisa di tarik kesimpulan bahwa Variabel DP (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Uji Simultan (Uji F)

Dapat diketahui pada nilai *F-Statistic* sebesar 32.28058 dengan nilai *Prob. (F-Statistic)* sebesar 0.000914 (<0.05) maka bisa di tarik kesimpulan bahwa variabel PDRB (X1), Jumlah penduduk (X2), Belanja modal (X3), dan Dana perimbangan (X4) secara bersama sama berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.932897 disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh Variabel *Independen* terhadap Variabel *Dependen* secara simultan (bersamaan) sebesar 93,2%. Sedangkan sisanya sebesar 6,8% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

D. Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil estimasi regresi berganda, PDRB kabupaten Lombok Barat menunjukkan koefisien regresi sebesar 54360,77 dan nilai probabilitas sebesar 0,0088, atau lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa PDRB mempunyai pengaruh positif

dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Derah. Penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Dina Rizky Ramadhan dkk., yang menemukan bahwa PDRB memiliki pengaruh signifikan secara bersamaan terhadap Pendapatan Asli Derah. Peningkatan PDRB akan meningkatkan PAD melalui efek multiplier, di mana pengeluaran pemerintah daerah menciptakan dampak ekonomi tambahan. Untuk meningkatkan PAD, pemerintah perlu fokus pada transformasi ekonomi, seperti optimalisasi kawasan industri, peningkatan belanja daerah produktif, dan penerbitan peraturan daerah mengenai pajak daerah(Ramadhani et al., 2024).

E. Pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah

Jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Barat memberikan dampak positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil estimasi regresi berganda menunjukkan koefisien regresi sebesar 614666,8 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0580, yang sama dengan 0,05. Temuan ini konsisten dengan penelitianOktiani (2021), yang juga menemukan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini mendukung teori yang menjelaskan adanya hubungan antara jumlah penduduk dan pendapatan asli daerah. Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari kegiatan ekonomi penduduk, seperti pemungutan pajak, retribusi, dan lainnya. Kehadiran penduduk memberi dampak positif dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah dan meningkatkan PAD.

F. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah

Belanja modal di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan hasil estimasi regresi berganda. Koefisien regresi yang diperoleh sebesar -0,210246 dengan nilai probabilitas 0,0154, yang lebih kecil dari 0,05, mengindikasikan bahwa belanja modal memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap PAD. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani *et al.*, (2024) yang menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang ditujukan untuk pembangunan sarana dan prasarana.

G. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil estimasi regresi berganda yang telah dilakukan, Dana Perimbangan Kabupaten Lombok Barat menunjukkan koefisien regresi sebesar -

0,091140 dengan nilai probabilitas 0,2255, yang lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh negatif yang tidak signifikan antara dana perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Teori Ketergantungan Fiskal menjelaskan bahwa daerah yang sangat bergantung pada dana perimbangan dari pemerintah pusat cenderung mengalami kesulitan dalam meningkatkan PAD. Ketergantungan ini terjadi karena minimnya insentif bagi pemerintah daerah untuk menggali potensi pendapatan lokal, seperti pajak dan retribusi, karena mereka merasa cukup dengan dana perimbangan yang diterima. Menurut buku "Public Finance" karya Rosen dan Gayer, ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat dapat mengurangi dorongan bagi daerah untuk meningkatkan PAD, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal (Rosen & Gayer, 2014).

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji dampak PDRB, jumlah penduduk, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap PAD Kabupaten Lombok Barat selama periode 2014-2023 dengan menggunakan regresi linear berganda, baik secara individu maupun bersama-sama. Analisis dilakukan dengan metode regresi linear berganda dan melibatkan pengujian asumsi klasik, yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, yang kesemuanya menunjukkan bahwa model regresi memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB dan jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap PAD, sementara belanja modal dan dana perimbangan berpengaruh negatif, meskipun tetap signifikan, terhadap PAD. Secara bersamaan, keempat variabel independen tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap PAD, yang menandakan pentingnya pengelolaan faktor ekonomi dan fiskal secara efektif untuk meningkatkan PAD. Namun, efisiensi dalam belanja modal dan kebijakan fiskal daerah perlu diperkuat untuk mendukung kinerja PAD yang berkelanjutan

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah perlu memperkuat kebijakan fiskal dengan memberikan insentif pada sektor produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengelolaan dana perimbangan harus difokuskan pada pembangunan sektor unggulan dengan perencanaan berkelanjutan.

Selain itu, pembaruan data kependudukan secara berkala penting untuk memastikan akurasi dalam pengambilan kebijakan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus yang hanya pada Kabupaten Lombok Barat saja. Bagi peneliti berikutrnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang memengaruhi PAD, seperti pendidikan, investasi swasta, atau sektor pariwisata. Selain itu, perbandingan dengan kabupaten/kota lain di NTB dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai strategi pengelolaan PAD yang efektif.

REFERENSI

Adriani, E. (2018). Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *8*(2), 1–6.

Asmuruf, M. F., Rumate, V. A., & Kawung, G. M. V. (2015). Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, *15*(05), 732.

Batik, K. (2013). Analisis Pengaruh Investasi, Pdrb, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *11*(1), 125. https://doi.org/10.22219/jep.v11i1.3735

BPK. (2014). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. *Procedia Manufacturing*, *1*(22 Jan), 1–17.

BPS. (2023). *Statistik Ketenagakerjaan Indonesia*. Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat.

Goban, Y. T. N. ., Maradita, F., & Hidayat, M. S. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2021. *Commodity*, *1*(1), 9–23.

Katjong, K., Yanuaria, T., Polontoh, H. M., & Mulyadi, D. (2024). Penerapan Ipteks Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. *Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia*, *3*(1), 8–14. https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855

Maharani, A. Z., Annundi, S. A., Wulansari, W. W., Susanti, I. A., & Ardhiarisca, O. (2024). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, *Vol. 1*(No. 3), 65–74.

Manduapessy, R. L. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, *4*(2), 39–57.

Oktiani, A. (2021). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan*, *1*(1), 16–35.

Ramadhan, M., & Syahidin, S. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah. *Gajah Putih Journal of Economics Review*, *2*(2), 01–10. https://doi.org/10.55542/gpjer.v2i2.225

Ramadhani, D. R., Fadila, W. N., & Safira, N. (2024). Analisis Pengaruh Belanja Daerah dan PDRB terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, *5*(1), 20–37. https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.511

Rosen, H. S., & Gayer, T. (2014). *Public Finance*. McGraw Hill.

Sriningsih, S., Haryanto, T., Solihin, A., & Sriningsih1, S. (2024). Education and Health Functions. *Jejak*, *17*(1), 17.

Sriningsih, S., Suriadi, I., & Fatimah, S. (2023). Government Expenditure according to Functions and Economic Growth in Indonesia. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, *2*(5), 1933–1956. https://doi.org/10.55927/eajmr.v2i5.3957